

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Ima Pastikan Anggarkan Rp 1,1 Triliun

Palmerah, Warta Kota

Pimpinan DPRD DKI Jakarta memastikan duit Rp 1,1 triliun untuk program sekolah swasta gratis bakal dianggarkan dalam APBD 2025.

Saat ini, eksekutif dan legislatif tengah menggelar rapat kerja konsultasi untuk pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, program pendidikan gratis sudah diusulkan oleh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu dengan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun.

Program ini akan diuji coba di sekolah swasta yang siap menampung pelajar dengan latar belakang ekonomi keluarga rendah.

"Itu yang akan kami coba, berikutnya, nanti bagaimana evaluasinya sambil berjalan, yang penting kami sebagai anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan," kata Ima pada Kamis (24/10/2024).

Ima mengatakan, DPRD DKI Jakarta juga akan mengevaluasi program KJP Plus dan KJMU terlebih dahulu. Ketika program sekolah gratis dieksekusi pada 2025, anggaran KJP akan dialihkan.

"Sekolah gratis bisa Juli 2025, KJMU nggak dihapus cuma KJP, karena kan nanti di 2025 pun ketika sudah ada sekolah gratis, anggaran dari KJP dialihkan," ucap Ima.

Menurut dia, pemerintah daerah juga akan mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 6 triliun untuk APBD 2025.

Duit sebanyak itu akan dialihkan untuk program pendidikan, kemacetan, penanggulangan banjir hingga makan bergizi gratis.

"Dari Rp 6 triliun itu sekitar Rp 2 triliun kalau tidak salah (makan bergizi gratis), nanti masih dikroscek lagi, kan itu anggarannya dari Kemenkeu," imbuhnya.

Kata dia, duit sebanyak itu memang dialokasikan khusus untuk menunjang program strategis nasional (PSN) pemerintah pusat.

Karena itu, duit Rp 6 triliun digunakan untuk berbagai kebijakan yang menyangkut dengan program pemerintah pusat.

"Jadi, KJMU nggak dihapus, cuma KJP, yang tadi saya sampaikan di rapat, postur (anggaran) 27 persen di Disdik, bisa. Maksudnya jangan sampai gaji guru masuk ke situ, biar ada tambahan lagi buat penerima KJP, tapi kan tergantung Gubernur berikutnya bagaimana," jelas Ima. **(faf)**

Dana bagi hasil

ALOKASI ANGGARAN DISDIK TAHUN 2025

Total anggaran: Rp 17,60 triliun (23,31 persen dari total belanja daerah sebesar Rp 75,51 triliun)

Rincian:
 - Belanja pegawai Rp 7,83 triliun (44,51 persen),
 - Belanja bansos (KJP, KJMU, beasiswa dll) Rp 2,44 triliun (13,91 persen),
 - Belanja modal Rp 2,06 triliun (11,76 persen),

- Belanja hibah Rp 1,55 triliun (8,81 persen),
 - Belanja barang dan jasa Rp 3,69 triliun (21,02 persen).